

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian tidak hanya berlaku dalam masyarakat, tetapi juga dalam pemerintahan, terutama dalam hal mengelola dana masuk dan keluar. Di satu sisi, lembaga pemerintah harus membelanjakan uang untuk mendukung kegiatan instansi/lembaga, sementara di sisi lain, Instansi tersebut harus melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kinerja. Ini dilakukan untuk menghindari penggunaan anggaran yang tidak efisien, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi lembaga pemerintah itu sendiri (Maidar & Rosalia, 2022).

Anggaran merupakan rancangan terperinci yang dibuat oleh manajemen untuk memandu kegiatan operasional selama satu periode tertentu. Rencana ini dijabarkan secara kuantitatif, termasuk target produk dan harga jual yang diproyeksikan untuk tahun depan. Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien, dan hemat agar alokasi dana tidak menyimpang dari rencana. Penyerapan anggaran yang rendah menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mendorong pendapatan domestik bruto (PDB) masih belum maksimal. Sumber daya negara yang terbatas harus dioptimalkan untuk mendukung kegiatan strategis melalui alokasi anggaran yang tepat. Hal ini penting mengingat sumber penerimaan negara yang terbatas, sehingga pemerintah harus menetapkan prioritas dan mengatur anggaran secara efisien. (Kuntadi & Dian Rosdiana, 2022).

Anggaran publik adalah rancangan keuangan pemerintah untuk periode tertentu yang menggambarkan pemasukan, pengeluaran, dan aktivitasnya. Rencana ini menunjukkan tujuan yang akan dicapai dan cara mewujudkannya dengan dana yang tersedia. Pentingnya perencanaan, pengendalian, dan pengawasan anggaran publik untuk mencegah kebocoran dan memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Anggaran publik merupakan alat penting untuk merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi keuangan pemerintah secara bertanggung jawab dan transparan. Analisis realisasi anggaran menjadi dasar evaluasi kinerja, koreksi, dan perbaikan di masa depan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik. (Tamburaka et al., 2020).

Kesalahan dalam menyusun anggaran dapat mengakibatkan underfinancing (pendanaan kurang) atau overfinancing (pendanaan berlebih). Kedua situasi ini berakibat negatif pada efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintah. Anggaran merupakan alat penting untuk menjalankan strategi organisasi. Penyusunan anggaran harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-undang Pengelolaan Keuangan Negara. Undang-undang ini memberi otoritas kepada pemerintah untuk merencanakan, mencari sumber dana, mengalokasikan, mengendalikan, dan mengawasi pengelolaan keuangan negara secara independen. Anggaran berfungsi sebagai dasar perencanaan organisasi untuk menetapkan sasaran keuangan, mengalokasikan sumber daya secara optimal, dan menentukan prioritas pengeluaran.

Pengendalian keuangan mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran belanja dapat mencukupi seluruh kebutuhan program dan program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini Penting untuk memaksimalkan penggunaan dana agar tujuan program dapat tercapai secara efektif. Pemerintah pusat memperoleh dana dari berbagai sumber, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), pajak, dan sumber daya alam. Dana ini digunakan untuk melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan lainnya. Kebijakan mengenai cara penggunaan dana tersebut ditetapkan dengan tujuan memastikan pemanfaatannya secara optimal, transparan, dan akuntabel.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, Laporan Realisasi Anggaran merupakan dokumen yang menyajikan informasi mengenai penggunaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode tertentu. Laporan ini menjadi tolok ukur penting untuk menilai tingkat penyerapan anggaran, efektivitas, dan efisiensi program pemerintah. Tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi mencerminkan program pemerintah yang berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini dapat dicapai dengan mengalokasikan anggaran secara optimal, meminimalisir pemborosan, dan memaksimalkan manfaat program. Meskipun pemerintah selalu berusaha mencapai kriteria efisien dan efektif dalam mengalokasikan anggaran, pemenuhan target anggaran yang telah ditetapkan menjadi syarat mutlak untuk mewujudkannya.

Ketidakmampuan memenuhi target anggaran dapat menghambat pencapaian tujuan program dan menggagalkan kriteria efisiensi dan efektivitas. (Prasetyo & Nugraheni, 2020)

Anggaran pendapatan dan belanja setiap tahun harus dibuat oleh semua pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam perencanaan anggaran, elemen distribusi, stabilisasi, dan alokasi perlu diperhatikan untuk memastikan dana digunakan secara efektif. Proses penyusunan anggaran berfungsi secara integratif dan sinergis, memungkinkan berbagai bagian berkolaborasi dalam pembagian dana. Pentingnya fungsi anggaran sangat terkait dengan kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tetapi anggaran memiliki kelemahan, baik jangka pendek maupun panjang, yang harus diperhatikan.

Tingkat efisiensi kegiatan pemerintah pusat merupakan indikator penting dalam menilai kinerja keuangannya. Efisiensi menunjukkan kemampuan pemerintah pusat dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal, termasuk faktor produksi, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketika tingkat efisiensi rendah, hal ini dapat mengakibatkan pemborosan dan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan belanja negara, yang pada akhirnya dapat menurunkan kinerja keuangan pemerintah pusat. Maka dari itu, pemerintah pusat perlu mengambil langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi kegiatannya dan menekan belanja negara.

Efektivitas dimaknai sebagai pencapaian hasil program sesuai target yang telah ditetapkan. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan pengeluaran yang

dikeluarkan dengan hasil yang dicapai. Perbandingan antara hasil yang diharapkan dan yang terealisasi ini selalu berkaitan erat dengan efektivitas. Indikator efektivitas mencakup pengukuran seberapa baik tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya telah tercapai. Dengan kata lain, efektivitas melibatkan penilaian apakah suatu target telah dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. (Khaira et al., 2022).

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Pinang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kekayaan alam Indonesia dari ancaman Penyakit Hewan Karantina serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992, pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam melindungi sumber daya alam, termasuk flora dan fauna, dari gangguan dan kerusakan. Fokus utama balai karantina ini adalah pada langkah-langkah pencegahan untuk mencegah masuknya hama dan penyakit yang dapat mengganggu pertanian serta keseimbangan ekosistem alam. Dengan tindakan isolasi dan pengendalian ketat terhadap organisme berbahaya, balai karantina memainkan peran kunci dalam mendukung keberlanjutan sumber daya alam dan mendukung pertanian yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas, anggaran merupakan instrumen perencanaan dan kontrol yang esensial dalam menjalankan program kegiatan rencana kerja. Dengan fokus khusus pada aspek-aspek seperti penyerapan dana, kecukupan alokasi untuk program dan kegiatan yang berdampak pada sektor pertanian, serta dampak dari realisasi belanja terhadap pencapaian tujuan strategis

Balai Karantina Pertanian. Dikarenakan adanya peningkatan daya serap anggaran di dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah daya serap anggaran tersebut menjadi isu utama yang mempengaruhi hasil akhir dari alokasi anggaran belanja. Permasalahan ini mencakup ketidakmampuan untuk secara optimal menggunakan sumber daya keuangan yang telah dialokasikan, yang selanjutnya tercermin dalam tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran belanja masih belum sepenuhnya optimal. Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan program dan kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas penggunaan anggaran perlu menjadi fokus utama.

Tabel 1.1

Tingkat Persentase Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran

Tahun	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2018	97,6	Efektif	66,54	Efisien
2019	88.32	Cukup Efektif	68,62	Efisien
2020	95,80	Efektif	74,05	Efisien
2021	98,33	Efektif	63,77	Efisien
2022	84,48	Cukup Efektif	68,43	Efisien

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan, tetapi tingkat efisiensinya masih stabil. Peningkatan efektivitas tersebut dapat dilihat dari tingginya nilai efektivitas pada tahun 2018, 2020 dan 2021, yaitu 97,6%, 95,80% dan 98,33%. Hal ini menunjukkan bahwa Instansi tersebut telah mampu mencapai tujuan dan sasarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, tingkat efisiensi kinerja pemerintah daerah dikatakan dengan efisien. Hal ini dapat dilihat dari nilai efisiensi yang rata-ratanya berada di 68,28%. Hal ini menunjukkan bahwa Instansi mampu menggunakan anggarannya secara optimal.

Data tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan antara tingkat efisiensi dan efektivitas selama periode tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, atau pelaksanaan program, Rendahnya kualitas sumber daya manusia, Kurangnya pengawasan dan pengendalian. Dengan meningkatnya target anggaran dari tahun ke tahun, perencanaan dan pengendalian yang lebih baik menjadi kunci untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan efektif dalam mencapai tujuan strategis secara berkelanjutan. Upaya-upaya perbaikan perlu dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Terdorong oleh data yang menarik, penulis berkeinginan untuk mengkaji laporan realisasi anggaran dan belanja Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang dari sudut pandang efektivitas dan efisiensi. Ketertarikan ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang telah meneliti topik serupa, yaitu efektivitas dan efisiensi anggaran dan realisasi belanja.

Ariel Sharon Sumenge telah melakukan penelitian sebelumnya dengan judul "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah." Efektivitas anggaran belanja BAPPEDA Minahasa menunjukkan bahwa tingkat efektivitasnya bervariasi dari tahun ke tahun. Meskipun anggaran belanja dianggap efektif pada sebagian besar tahun penelitian, terdapat perbedaan antara realisasi anggaran belanja dengan targetnya pada tahun 2011, yang mengakibatkan tingkat efektivitasnya rendah. Secara keseluruhan, anggaran belanja BAPPEDA Minahasa Selatan selama tahun 2008-2012 diolah secara efisien. (Yunina, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Harry P. Paat, Grace B. Nangoi dan Rudy J. Pusung yang berjudul "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon." Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan anggaran belanja BAPPEDA Kota Tomohon mengalami pasang surut antara 2015 dan 2017. Meskipun efektif di tahun 2015, efektivitasnya menurun di tahun 2016 dan 2017. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan dan pencapaian target anggaran yang lebih baik untuk memastikan tercapainya semua program dan kegiatan dalam DPA. (Paat et al., 2019).

Berdasarkan hasil research gaps ini dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi Anggaran Belanja masih menunjukkan perbedaan antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Dalam hal tersebut terjadi inkonsistensi hasil riset yang sudah ada mengenai efektivitas dan efisiensi anggaran dan realisasi belanja yang bahkan sudah diawasi oleh badan pengawas pemerintah.

Melihat realisasi anggaran belanja Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang yang belum sepenuhnya optimal, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul “**Analisis Anggaran Dan Realisasi Anggaran Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Di Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah memaparkan permasalahan, identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tampilnya fluktuasi yang signifikan dalam tingkat efisiensi dan efektivitas dari tahun ke tahun menunjukkan ketidakstabilan dalam pengelolaan anggaran. Variabilitas ini dapat disebabkan oleh perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, atau implementasi program yang memengaruhi alokasi dan penggunaan dana, atau strategi pengelolaan yang belum konsisten. Adanya fluktuasi tersebut dapat juga dipicu oleh perubahan kebijakan yang memengaruhi alokasi dan penggunaan anggaran. Perubahan aturan atau pedoman dapat memerlukan penyesuaian dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Evaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi dianggap krusial untuk memastikan adanya tantangan dalam optimalitas penggunaan sumber daya serta anggaran digunakan secara optimal dan bahwa tujuan program dapat dicapai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah memaparkan permasalahan di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

Kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara pencapaian tujuan program dengan penggunaan sumber daya keuangan dan Rendahnya kualitas sumber daya manusia

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat efektivitas anggaran dan realisasi belanja Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang tahun 2018-2022.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat efisiensi anggaran dan realisasi belanja Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang tahun 2018-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Pengembangan Pengetahuan: Penelitian ini dapat memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendalami topik efektivitas dan efisiensi anggaran dalam konteks Balai Karantina Pertanian. Penulis dapat mengembangkan pemahaman mengenai tata kelola keuangan pemerintah dan dampaknya terhadap kinerja suatu lembaga.
 - b. Melalui penelitian ini, penulis berkesempatan untuk meningkatkan kemampuan analisis data, terutama dalam menafsirkan laporan keuangan dan realisasi anggaran, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi secara objektif berdasarkan data yang terukur.

2. Bagi Instansi

- a. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tergambar kondisi dan diperoleh masukan bagi Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, sehingga tercapai realisasi sesuai dengan rencana.
- b. Dengan memahami tingkat efektivitas dan efisiensi, instansi dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait alokasi anggaran dan perbaikan proses manajerial. Keputusan yang tepat dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan lembaga.
- c. Dapat membantu instansi mengevaluasi kinerja keuangan Instansi Hal ini membuka peluang untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala dalam pengelolaan anggaran serta menentukan langkah-langkah perbaikan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian ini bisa berkontribusi pada temuan penelitian sebelumnya dengan menawarkan sudut pandang baru atau melengkapi aspek-aspek yang mungkin belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.
- b. Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang terkait, baik dari sudut pandang keuangan, manajemen, dan kebijakan publik.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan alat penting untuk memastikan akuntabilitas dan pengelolaan dana publik secara bertanggung jawab, serta untuk mendukung efektivitas program. Anggaran juga berfungsi sebagai pernyataan resmi yang merumuskan tujuan kinerja yang ingin dicapai dalam periode tertentu, diukur dalam satuan mata uang. Dasar dari penyusunan anggaran adalah rencana perkiraan untuk masa depan yang disusun secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Proses pembuatan anggaran, yang dikenal sebagai penganggaran, melibatkan berbagai tugas seperti menetapkan aturan kerja, membentuk struktur organisasi, dan memantau pelaksanaan tugas. Aspek-aspek yang harus dicakup dalam anggaran sektor publik meliputi: (Mardiasmo, 2018):

- a. Aspek perencanaan
- b. Aspek pengendalian
- c. Aspek akuntabilitas

2.1.1.2 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran publik merupakan sebuah dokumen yang memuat rancangan aktivitas keuangan, diwujudkan dalam bentuk perkiraan pendapatan dan pengeluaran dalam satuan mata uang. Secara sederhana, anggaran sektor publik

dapat diartikan sebagai dokumen kerja yang menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas, meliputi informasi tentang pemasukan, pengeluaran, dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Anggaran ini menjadi acuan bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya di masa depan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketentuan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Negara merupakan sumber pemasukan Pemerintah Pusat yang sah dan diakui. Pendapatan ini terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Non-Pajak, dan Penerimaan Hibah, yang secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan kekayaan bersih negara.
- b. Belanja Negara merupakan beban keuangan yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersihnya. Belanja Negara ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.
- c. Pembiayaan Anggaran adalah sumber dana penting bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program dan kegiatannya. Dana ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti pinjaman, penjualan aset, dan kelebihan dana dari tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan Anggaran dapat digunakan untuk

membayai pengeluaran di tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

- d. SiLPA merupakan indikator yang menunjukkan apakah pemerintah telah berhasil mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanjanya dalam APBN selama satu periode tertentu.

Dalam sistem demokrasi, pemerintah berperan sebagai perwakilan rakyat dalam mengelola keuangan negara. Anggaran sektor publik menjadi cerminan rencana pemerintah dalam menggunakan dana rakyat tersebut untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.1.1.3 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu :

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning tool*)

Pemerintah menyusun anggaran sektor publik sebagai panduan untuk menjalankan berbagai program dan kegiatannya. Anggaran ini membantu pemerintah dalam memperkirakan kebutuhan dana, mengalokasikan sumber daya secara optimal, dan mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

- 1) Menyusun tujuan dan sasaran kebijakan yang terukur, realistis, dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu, dengan mempertimbangkan visi, misi, dan target yang telah ditetapkan.

- 2) Merencanakan program dan kegiatan yang terukur, terarah, dan terjadwal untuk mencapai target organisasi, serta merancang skema pendanaan yang transparan dan akuntabel.
- 3) Mengalokasikan sumber daya keuangan secara terstruktur dan sistematis untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- 4) Membangun sistem pelaporan yang efektif untuk memantau kemajuan implementasi strategi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

b. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control tool*)

Anggaran sektor publik menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam mengendalikan keuangan negara dan memastikan akuntabilitas kepada rakyat. Alat ini menyediakan peta rinci pendapatan dan pengeluaran, sehingga setiap rupiah yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Tanpa anggaran yang terstruktur, pemerintah berisiko terjerumus dalam pemborosan dan penyimpangan dana. Pengendalian anggaran dapat dilakukan melalui 4 cara :

- 1) Membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang diharapkan.
- 2) Menghitung selisih anggaran
- 3) Mengembangkan rencana untuk mengatasi penyebab yang dapat dikendalikan.
- 4) Menyesuaikan standar biaya dan target anggaran untuk periode mendatang

c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*)

Anggaran publik berperan sebagai kompas kebijakan fiskal yang mengarahkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Alat ini memberikan gambaran jelas tentang arah kebijakan fiskal pemerintah, memungkinkan prediksi dan estimasi yang akurat terhadap kondisi ekonomi.

Lebih dari sekadar alat perencanaan keuangan, anggaran publik memiliki kekuatan untuk menggerakkan, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan mengalokasikan sumber daya secara optimal dan bertanggung jawab, anggaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif

d. Anggaran sebagai alat politik (*Political tool*)

Anggaran publik merupakan alat penting untuk menentukan prioritas dan kebutuhan keuangan, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menggunakan dana publik. Menyusun anggaran yang efektif membutuhkan keterampilan politik, Anggaran yang efektif memerlukan kemampuan politik, membangun koalisi, negosiasi, dan pemahaman manajemen keuangan publik. Kegagalan dalam dapat melaksanakan anggaran berdampak fatal bagi pemimpin publik dan pemerintah.

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication tool*)

Anggaran publik memiliki peran penting dalam menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai unit kerja dalam pemerintahan. Melalui

anggaran, ketidakcocokan dalam pencapaian tujuan organisasi dapat diidentifikasi dan komunikasi antar unit kerja dapat ditingkatkan. Penyampaian informasi anggaran kepada seluruh bagian organisasi sangat penting untuk memastikan pelaksanaan anggaran yang efektif.

f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*Performance measurement tool*)

Anggaran bukan hanya sekadar dokumen keuangan, tetapi juga bukti komitmen dan tolok ukur kinerja pemimpin eksekutif. Pencapaian target anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi indikator utama dalam penilaian kinerja eksekutif. Anggaran berfungsi sebagai alat kontrol dan evaluasi yang efektif untuk memastikan penggunaan dana publik secara bertanggung jawab.

g. Anggaran sebagai alat motivasi (*Motivation tool*)

Anggaran yang efektif dapat menjadi alat motivasi yang ampuh bagimanajer dan stafnya untuk bekerja dengan hemat, efisien, dan produktif. Kunci untuk mencapai motivasi yang optimal adalah dengan menetapkan target anggaran yang realistis dan dapat dicapai. Anggaran yang tepat dapat membantu organisasi mencapai tujuan dan targetnya dengan meningkatkan kinerja pegawai.

h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang public (*Public sphere*)

Anggaran publik merupakan proses yang harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, birokrat, lembaga legislatif, dan masyarakat. Partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat, baik yang terorganisir maupun yang kurang terorganisir, sangatlah penting untuk memastikan

bahwa anggaran publik mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran publik dapat berakibat pada berbagai konsekuensi negatif, seperti protes dan boikot.

2.1.1.4 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa anggaran sektor publik dapat dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu :

a. Anggaran operasional

Anggaran pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah, seperti gaji pegawai, biaya operasional kantor, dan pemeliharaan infrastruktur. Pengeluaran rutin dalam anggaran operasional hanya memberikan manfaat jangka pendek dan tidak meningkatkan kekayaan atau aset pemerintah.

b. Anggaran Modal

Anggaran ini memuat rencana jangka panjang untuk pembelian aset permanen seperti gedung, peralatan, kendaraan, dan furnitur. Dana untuk pembelian aset bernilai tinggi ini seringkali diperoleh dari pinjaman. Belanja modal, yang berbeda dengan belanja rutin, memberikan manfaat jangka panjang yang melampaui satu tahun anggaran. Manfaat ini berupa penambahan aset atau kekayaan pemerintah, yang pada gilirannya akan meningkatkan pengeluaran rutin untuk operasional dan perawatan aset tersebut.

2.1.1.5 Prinsip Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018) prinsip anggaran sebagai berikut :

a. Otorisasi oleh Legislatif

Pemerintah wajib mendapatkan persetujuan anggaran dari badan legislatif sebagai syarat utama dalam penggunaan dana publik

b. Komprehensif

Anggaran yang komprehensif harus mencakup semua sumber pendapatan dan alokasi pengeluaran pemerintah. Keberadaan dana non-anggaran menimbulkan kekhawatiran tentang pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan akuntabel.

c. Keutuhan anggaran

Transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah dapat terwujud dengan mengintegrasikan semua penerimaan dan pengeluaran ke dalam dana umum.

d. *Nondiscretionary appropriation*

Dewan legislatif memiliki kewajiban untuk mengawasi dan mengevaluasi pemanfaatan dana anggaran agar terjamin kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

e. Periodik

Sifat periodik anggaran mengharuskan penyusunan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara berkala, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan yang berkembang dalam kurun waktu tertentu.

f. Akurat

Pemerintah perlu menghindari praktik penyusunan anggaran dengan cadangan tersembunyi untuk memastikan pengelolaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab.

g. Jelas

Pemerintah perlu berkomitmen untuk menyusun anggaran yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

h. Dipublikasi

Keterbukaan anggaran dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

2.1.1.6 Siklus Anggaran Sektor Publik

Siklus anggaran merupakan proses yang berkelanjutan dan dapat berulang setiap tahun atau periode waktu tertentu. Tujuan dari siklus ini adalah untuk mengelola sumber daya keuangan sektor publik dengan lebih baik, memastikan bahwa dana publik digunakan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2018) siklus anggaran memiliki beberapa tahap, yaitu :

a. Tahap Persiapan Anggaran (*budget preparation*)

Dalam tahap awal penyusunan anggaran, pengeluaran dihitung berdasarkan perkiraan pendapatan yang tersedia. Sebelum menyetujui proyeksi pengeluaran, penting untuk melakukan estimasi pendapatan yang lebih

tepat. Selain itu, ketika mengambil keputusan terkait anggaran pengeluaran, harus diingat bahwa kesalahan dalam memperkirakan pendapatan anggaran bisa menghadirkan risiko yang signifikan.

b. Tahap Ratifikasi Anggaran (*budget ratification*)

Kemampuan menjawab dan menjelaskan secara rasional atas pertanyaan dan bantahan dari legislatif merupakan esensial bagi pimpinan eksekutif dalam proses pembahasan anggaran.

c. Tahap Pelaksanaan Anggaran (*budget implementation*)

Keahlian dan profesionalisme manajer keuangan publik menjadi faktor penentu dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran di sektor publik.

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Sistem akuntansi dan pengendalian manajemen yang baik menjadi fondasi penting bagi implementasi anggaran yang akuntabel, sehingga proses evaluasi dan pelaporan anggaran pun dapat dilakukan dengan lebih efektif.

2.1.1.7 Pentingnya Anggaran Sektor Publik

Anggaran sangat penting dalam sektor publik. Menurut Majid (2019), anggaran sektor publik berperan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. (Jamaludin, 2021).

- a. Melalui penyusunan anggaran yang efektif, pemerintah dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi, memastikan keberlanjutan program pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

- b. Kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan keterbatasan sumber daya yang ada menuntut penggunaan anggaran yang efektif dan efisien untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan.
- c. Melalui penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

2.1.2 Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menunjukkan berapa banyak uang yang diterima dan dikeluarkan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu. LRA dibuat berdasarkan prinsip kas, yang berarti bahwa pendapatan dan pengeluaran dicatat pada saat uang diterima atau dikeluarkan.

Laporan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) berfungsi sebagai sumber informasi bagi para penggunanya tentang penggunaan dana yang diserap, sesuai dengan ketentuan APBN/APBD dan peraturan yang berlaku. Dibuatnya laporan realisasi anggaran bertujuan untuk menunjukkan bagaimana entitas pelaporan dalam hal ini, pemerintah, menggunakan dan melaksanakan anggaran. Perbandingan antara anggaran dan kinerja dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan yang telah disepakati oleh legislatif dan eksekutif, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Rahmi et al., 2023)

LRA disusun dengan menonjolkan elemen-elemen penting seperti pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan agar informasinya mudah dipahami. Catatan atas Laporan Keuangan melengkapi LRA dengan informasi tambahan, seperti penjelasan tentang variabel yang memengaruhi pelaksanaan anggaran (kebijakan fiskal/moneter), alasan deviasi antara anggaran dan realisasi, serta rincian angka-angka penting. Lebih dari itu, laporan realisasi anggaran minimal mencakup hal-hal berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit-LRA
- e. Penerimaan Pembiayaan
- f. Pengeluaran Pembiayaan
- g. Pembiayaan Neto
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

2.1.2.1 Tujuan dan Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

- a. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran
 - 1) Penetapan standar penyajian LRA bertujuan untuk menciptakan pedoman yang jelas dan konsisten dalam penyusunan LRA, memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Perusahaan

- 2) Tujuan utama pelaporan realisasi anggaran adalah untuk menginformasikan kepada pihak-pihak terkait mengenai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

- 1) Melalui penyajian data realisasi keuangan dan perbandingannya dengan anggaran, LRA membantu pemegang saham dan investor dalam menilai kesehatan keuangan entitas pelaporan, efektivitas alokasi sumber daya, dan kepatuhannya terhadap anggaran.
- 2) Informasi dalam LRA dapat digunakan untuk membangun model keuangan yang memprediksi kinerja keuangan perusahaan di masa depan, sehingga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan investasi dan pendanaan yang lebih tepat.

2.1.3 Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan atau telah ditetapkan. Dalam beberapa konteks, efektivitas juga merujuk pada tingkat keberhasilan dalam mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan yang telah ditetapkan. Tidak hanya tentang melakukan sesuatu dengan cara yang benar, tetapi juga dengan cara yang benar untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Seringkali, efektivitas berhubungan erat dengan produktivitas dan hasil akhir. Namun, penting untuk diingat bahwa efektivitas bukanlah tentang melakukan segala sesuatu dengan sempurna, Namun fokusnya adalah pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang sesuai dan efisien.

Suatu program dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan capaian yang selaras dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dapat diukur dengan membandingkan antara keluaran (output) yang dihasilkan dengan hasil yang diperoleh. Selain itu, efektivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memilih tujuan dan alat yang tepat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Mayasari et al., 2021).

Dengan kata lain, dalam konteks ini, efektivitas mencakup dua hal utama:

- a. Pencapaian hasil yang diinginkan : Ini berarti mencapai target yang telah ditetapkan, menghasilkan keluaran atau output yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, dalam suatu program atau proyek, efektivitas akan diukur dari seberapa baik hasil yang telah direncanakan tercapai.
- b. Kemampuan dalam memilih cara atau metode yang tepat : Efektivitas juga melibatkan kemampuan untuk memilih tindakan atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan. Ini berkaitan dengan keputusan yang diambil dalam proses mencapai tujuan, seperti memilih pekerjaan atau metode yang sesuai untuk memastikan pencapaian tujuan secara optimal.

Efektivitas menekankan pentingnya mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan cara yang tepat dan memilih tujuan serta alat yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut.

Tujuan dari evaluasi efektivitas belanja langsung adalah untuk mengetahui seberapa jauh target anggaran telah tercapai. Semakin dekat suatu instansi pemerintah dengan targetnya, semakin efektif pelaksanaan kegiatan dan

programnya. Jika hasil kegiatan lebih dekat dengan target, maka pelaksanaan kegiatan dan program tersebut dianggap efektif. Sebaliknya, jika tingkat pencapaian lebih rendah dari target, itu menunjukkan bahwa ada aspek yang belum optimal dalam menjalankan program dan kegiatan tersebut (Oktaviani & Mulyandani, 2022).

Keberhasilan suatu program diukur dengan melihat seberapa besar pengaruh dan hasil yang ditimbulkannya dalam mencapai tujuan. Semakin besar kontribusi hasil yang diperoleh terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan, semakin efisien dan efektif proses kerja suatu unit organisasi. Evaluasi efektivitas dapat dilakukan dengan fokus pada hasil akhir (outcome) saja. Tingkat efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan yang telah ditentukan. rumus yang dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kriteria Tingkat Efektivitas

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efektivitas
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup Efektif
60% sampai 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

2.1.4 Efisiensi

Efisiensi dalam KBBI dijelaskan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan tepat, menggunakan waktu, tenaga, dan biaya dengan seminimal mungkin. Hal ini juga mencakup kedayagunaan, ketepatangunaan, dan kesangkilan dalam pelaksanaan suatu tugas. Secara ilmiah, efisiensi merujuk pada optimasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu, meminimalkan pemborosan dalam proses, dan meningkatkan produktivitas dengan mengurangi input yang diperlukan untuk output yang diinginkan.

Konsep efisiensi secara umum mencakup penggunaan sumber daya tanpa pemborosan dalam proses menuju hasil sesuai rencana atau harapan. Efisiensi memfasilitasi peningkatan produktivitas dan pendapatan hasil yang lebih tinggi dengan usaha yang efektif dan praktis. Ini berarti memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa menggunakan lebih banyak tenaga, waktu, atau biaya daripada yang diperlukan.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

Tabel 2.2 Kriteria Tingat Efisiensi

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efektivitas
Diatas 100%	Tidak Efisien
90% sampai 100%	Kurang Efisien
80% sampai 90%	Cukup Efisien
60% sampai 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Efisiensi dalam pengeluaran belanja pemerintah merujuk pada tahapan di mana realokasi sumber daya tidak lagi berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, efisiensi pengeluaran belanja pemerintah menggambarkan hasil yang paling optimal dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui setiap pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.

2.2 Peneliti Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil
1.	Jarkasih, Ruliana , Rachmawati	“Analisis Efektivitas dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur”	Efektivitas, Efisiensi, Anggaran	Kinerja penggunaan anggaran menunjukkan peningkatan efektivitas, dari 80% di tahun-tahun sebelumnya menjadi 90% di tahun anggaran 2019. Akan tetapi, perlu dilakukan

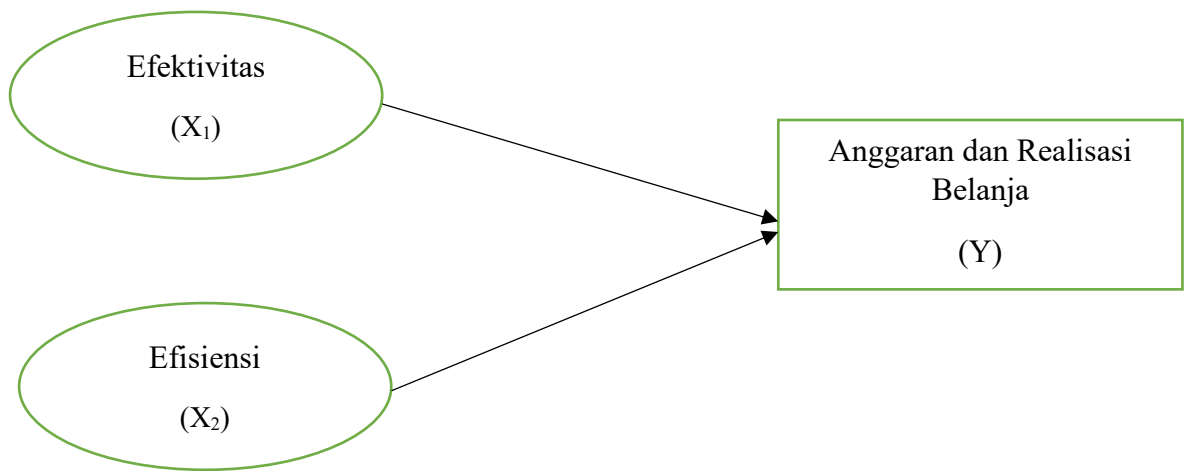
				evaluasi terhadap efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2018 hingga 2020, yang menunjukkan tingkat efisiensi di bawah 100%.
2.	Mayasari, Febriantoko, Africano	“Efisiensi Dan Efektivitas Belanja Langsung Pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan”	Efisiensi, Efektivitas Belanja Langsung	Hasil penelitian menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas belanja langsung berfluktuasi setiap tahun.
3.	Tamburaka, Dali, dkk	<i>“Analysis of The Effectiveness And Efficiency of Performance Based Shopping Budget in The Government of Kendari City”</i>	<i>Effectiveness, Efficiency, Shopping Budget</i>	Pada tahun 2013 dengan kategori efektif sedangkan tahun 2014-2017 berkategori cukup efektif. Tingkat efisiensi anggaran belanja daerah tahun 2013-2017 dikategorikan sangat efisien
5.	Hasan, Umar, Kurung	“Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Pegawai Pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai”	Efisiensi, Efektivitas Anggaran Belanja	Dalam pelaksanaan anggaran belanja tahun 2017-2019 dilakukan dengan sangat efisien dan sangat efektif.
6.	Khaira, Umar, dkk	“Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Pangan Aceh”	Efektivitas Efisiensi Anggaran Belanja	Anggaran belanja Dinas Pangan Aceh tergolong cukup efektif ditahun 2018 serta tergolong efektif di tahun 2019 dan tahun 2020. Disamping itu, anggaran belanja Dinas Pangan

				Aceh juga tergolong cukup efisien di tahun 2018 serta tergolong efisien di tahun 2019 dan 2020.
--	--	--	--	---

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu struktur atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengorganisir, mengaitkan, dan menjelaskan hubungan antara konsep-konsep atau ide-ide yang relevan dalam suatu domain atau bidang studi tertentu. Ini dapat berupa model konseptual, teori, atau kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk mengembangkan suatu pemahaman yang lebih dalam terhadap suatu topik atau fenomena.

Kerangka konseptual sering digunakan sebagai landasan untuk merumuskan pertanyaan penelitian, merencanakan eksperimen, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan yang kokoh bagi pembahasan atau analisis terhadap suatu masalah atau topik dengan cara yang sistematis dan terorganisir. Untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja, penelitian ini akan menyelidiki masalah realisasi anggaran, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 2.2
Kerangka konseptual